

## **Analisis Dampak Bantuan *World Health Organization* (WHO) Terhadap Krisis Kesehatan di Palestina Tahun 2023-2025**

**Wensensiana Yasinta Andim<sup>1\*</sup>, Yohana Damiana Uto Riangtobi<sup>1</sup>, Yeyen Subandi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author : [enchikandim63264@gmail.com](mailto:enchikandim63264@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received : 26-01-2026

Accepted : 31-01-2026

**Keywords:** WHO; Krisis Kesehatan; Palestina; Bantuan Kemanusiaan; Diplomasi Kesehatan Global

### **ABSTRAK**

Konflik antara Palestina dan Israel yang meningkat sejak Oktober 2023, menyebabkan terjadinya krisis kesehatan yang parah, khususnya di Jalur Gaza. Krisis kesehatan tersebut meliputi; berbagai kerusakan infrastruktur kesehatan, akses terhadap kesehatan terbatas, peningkatan penyakit baik yang menular dan yang tidak menular, dan tingginya korban sipil akibat konflik. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dampak bantuan *World Health Organization* (WHO) dalam menangani krisis kesehatan di Palestina selama periode 2023–2025 dan menganalisis peran WHO sebagai salah satu aktor internasional dalam melaksanakan diplomasi kesehatan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan konsep diplomasi kesehatan global sebagai kerangka analisisnya. Data yang terkumpul dilakukan melalui tinjauan literatur, dokumen resmi, serta data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan media, dan data statistik kesehatan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan dari WHO berpengaruh dalam mempertahankan layanan kesehatan dasar, menahan penyebaran penyakit, mengatasi kekurangan gizi, dan memperkuat sistem pemantauan kesehatan di tengah konflik. Sementara itu, sebagai aktor diplomasi kesehatan global, WHO aktif menyuarakan krisis tersebut untuk meningkatkan akses terhadap bantuan dan menyerukan gencatan senjata. Namun, efektivitas bantuan WHO masih terbatas oleh hambatan politik, blokade teritorial, dan kompleksitas kepentingan geopolitik internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa WHO memainkan peran penting dalam mengatasi krisis kesehatan di Palestina, tetapi membutuhkan dukungan multilateral yang lebih kuat untuk memaksimalkan dampaknya.

---

## **PENDAHULUAN**

Konflik Israel–Palestina merupakan konflik berkepanjangan yang berakar pada dinamika historis dan politik sejak awal abad ke-20, ketika wilayah Palestina beralih dari Kekaisaran Ottoman ke kekuasaan Inggris pasca Perang Dunia I. Melalui Deklarasi Balfour tahun 1917 dan mandat Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1923, Inggris membuka jalan bagi pembentukan negara nasional Yahudi di Palestina. Kebijakan tersebut memicu penolakan dari penduduk Arab Palestina dan menjadi awal meningkatnya ketegangan serta konflik berkepanjangan di kawasan tersebut (Anjani, 2025). Sejak saat itu, konflik terus bereskalasi dengan keterlibatan berbagai aktor internasional dan negara-negara besar, yang berdampak signifikan terhadap kondisi sosial, politik, dan kemanusiaan masyarakat Palestina.

Dampak konflik tersebut tidak hanya tercermin dalam aspek keamanan, tetapi juga menimbulkan krisis kemanusiaan yang kompleks, termasuk tingginya korban jiwa,

pengungsian massal, pembatasan pergerakan penduduk, blokade ekonomi, serta kerusakan infrastruktur vital. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor kesehatan. Kerusakan fasilitas kesehatan, keterbatasan akses terhadap layanan medis, serta terganggunya rantai pasok obat dan peralatan medis telah memperburuk kondisi kesehatan masyarakat Palestina, khususnya di wilayah Jalur Gaza.

Eskalasi konflik berskala besar sejak 7 Oktober 2023 semakin memperparah krisis kesehatan di Palestina. Serangan intensif dan blokade berkepanjangan menyebabkan runtuhnya sistem kesehatan, ditandai dengan kekurangan tenaga medis, terbatasnya fasilitas kesehatan yang berfungsi, serta minimnya pasokan obat-obatan dan peralatan medis. Kondisi ini mendorong peningkatan penyakit menular seperti diare dan infeksi saluran pernapasan, terutama di kalangan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Di samping itu, konflik yang berlangsung secara terus-menerus juga memicu masalah kesehatan mental, termasuk meningkatnya stres, trauma, kecemasan, dan depresi di kalangan penduduk sipil.

Laporan Health Cluster pada November 2024 menunjukkan bahwa hanya 7 dari 27 pusat kesehatan milik United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) yang masih beroperasi di Jalur Gaza. Fakta ini mencerminkan tingkat kerusakan infrastruktur kesehatan yang sangat parah dan mengancam keselamatan warga sipil (Health Cluster, 2025). Situasi tersebut menegaskan bahwa krisis kesehatan di Palestina tidak dapat dipisahkan dari konteks konflik bersenjata dan memerlukan perhatian serta respons serius dari komunitas internasional.

Dalam konteks inilah, peran organisasi internasional menjadi sangat krusial. *World Health Organization* (WHO) sebagai salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada isu kesehatan global memiliki mandat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dunia dan menangani masalah kesehatan lintas negara. Sejak didirikan pada tahun 1948, WHO tidak hanya menjalankan fungsi teknis di bidang kesehatan, tetapi juga berperan sebagai aktor penting dalam diplomasi kesehatan global, khususnya dalam merespons krisis kesehatan di wilayah konflik (Tarisa, 2021). Melalui kerja sama dengan negara-negara anggota, badan-badan PBB, organisasi kemanusiaan internasional, serta aktor non-negara, WHO berupaya mengoordinasikan bantuan kesehatan, memfasilitasi akses layanan medis, dan mengadvokasi kepentingan kesehatan masyarakat di tingkat global.

Namun demikian, penanganan krisis kesehatan di wilayah konflik seperti Palestina menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari hambatan politik, pembatasan akses kemanusiaan, hingga kompleksitas kepentingan geopolitik internasional. Secara historis, isu kesehatan global kerap diposisikan sebagai isu sekunder dibandingkan isu keamanan dan militer, sehingga respons internasional terhadap krisis kesehatan sering kali tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya diplomasi kesehatan sebagai instrumen strategis untuk menjembatani kepentingan berbagai aktor internasional dan mendorong respons kolektif terhadap krisis kesehatan global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak peran dan bantuan *World Health Organization* (WHO) dalam merespons krisis kesehatan di Palestina pada periode 2023–2025. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi bentuk diplomasi kesehatan global yang dilakukan oleh WHO, termasuk upaya advokasi kemanusiaan, seruan gencatan senjata, serta pola kerja sama dengan berbagai aktor internasional dalam upaya melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat Palestina.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dampak bantuan *World Health Organization* (WHO) terhadap krisis kesehatan di Palestina pada periode 2023–2025. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep diplomasi kesehatan global, yang memandang kesehatan sebagai instrumen kerja sama dan negosiasi antaraktor internasional.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen, yang meliputi dokumen resmi WHO, laporan organisasi internasional, jurnal ilmiah, laporan media, serta data statistik kesehatan yang relevan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara sistematis berbagai fenomena yang berkaitan dengan peran dan bantuan WHO, dengan menekankan pada karakteristik, kualitas, serta hubungan antara berbagai bentuk intervensi kesehatan dalam konteks konflik bersenjata (Creswell, 2014).

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas peran WHO dan dinamika diplomasi kesehatan global dalam penanganan krisis kesehatan di Palestina.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Penyebab Krisis Kesehatan di Palestina**

Konflik yang berkepanjangan di Palestina berakar dari berbagai peristiwa sejarah, keputusan politik, dinamika sosial di kawasan Timur Tengah yang saling terkait selama satu abad yang menyebabkan akar masalahnya sulit ditelisik dan dipahami. Rezim Kekaisaran Ottoman menjadi pilar penting dalam menelusuri akar konflik ini yakni wilayah Palestina berada dibawah regulasi dan kendali Inggris setelah Perang Dunia I. Deklarasi Balfour pada 1917 yang menyatakan dukungannya dalam pembentukan tanah air terhadap bangsa Yahudi di tanah Palestina dan disahkan pada tahun 1948 di bawah armada Inggris. Deklarasi tersebutlah yang kemudian memperburuk situasi, eksistensi wilayah palestina tidak jelas, sehingga menimbulkan ketegangan antara kedua pihak yaitu Palestina dan Yahudi (Robbani, 2025). Ketegangan tersebut kemudian meningkat menjadi konflik bersenjata terbuka setelah berdirinya negara Israel pada 1948. Peristiwa tersebut menimbulkan pengusiran terhadap penduduk asli Palestina, yang disebut dengan Nakba (Iswara, 2023). Konflik ini menimbulkan berbagai pertentangan dari berbagai kelompok, salah satunya ialah Hamas yang didirikan pada tahun 1987. Hamas dengan tegas menentang pendudukan yang dilakukan oleh Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Eksistensi Hamas menunjukkan, konflik yang terjadi bukan hanya antara aktor negara melainkan melibatkan berbagai aktor non negara (Janah, 2025).

Serangan Hamas pada 7 oktober 2023 dari jalur Gaza ke wilayah Israel memicu ketegangan dan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza yang berlanjut hingga awal 2025. Konflik yang semakin memanas ini menyebabkan kematian yang meningkat pada warga sipil Palesina, kerusakan infrastruktur sipil serta meningkatnya krisis kesehatan. Respon Israel dalam melindungi keamanan teritorinya ialah dengan memblokade total sejak oktober 2023, erta membatasi impor barang-barang kebutuhan primer seperti makanan, obat-obatan, bahan bakar dan bantuan kemanusiaan lainnya yang diarahkan ke Gaza, Palestina. Hal ini memperburuk krisis kesehatan masyarakat sipil di wilayah Palestina (Tarisa, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan konflik militer berskala modern sangat berdampak

langsung pada keamanan dan kesehatan masyarakat sipil. Gencatan senjata yang diserukan dan disepakati pada awal 2025 tidak menjadim tidak adanya tindakan kekerasan lagi terhadap masyarakat sipil, pereti kekerasan sporadis yang terus terjadi diwilayah Gaza. Konflik ini menyebabkan penderitaan yang terus berlanjut terhadap masyarakat sipil. Disisi lain, pemasokan bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional atau dari negara lain mengalami berbagai hambatan administratif, tekanan politik, serta karena terjjadinya blokade jalur pengiriman oleh Israel. Dapat disimpulkan, gencatan senjata yang berarti berakhirnya konflik tidak berarti krisis kesehatan ikut berhenti di lapangan (*Fragile ceasefire leaves Gaza civilians exposed to ongoing violence, 2025*).

Konflik antara Israel-Palestina telah bertransformasi dari sekedar perselisihan politik dan teritorial tetapi berubah menjadi sebuah krisis kemanusiaan dan kesehatan yang serius. Eskalasi konflik mencapai titik kritis setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang dipandang oleh Israel sebagai pelanggaran paling serius atas hak kedaulatan negara. Israel membalas dengan blokade total dan serangan udara intensif di Jalur Gaza. Sebagai respon Hamas mengepalai upaya serangan militan yang lebih intensif terhadap pemukiman Israel, setelah yang tentara Israel mulai menembakkan artileri sepanjang hari, dan mereka pun meluncurkan serangan invasi (*Cluster, 300 Days of War: Health Crisis in the occupied Palestinian territory, 2024*). Situasi ini memakan korban 38.300 jiwa, selain itu, 35.800 lainnya terluka dan juga menyebabkan kerusakan cukup parah pada fasilitas kesehatan dan infrastruktur, termasuk rumah sakit, klinik, dan fasilitas sanitasi. Kekurangan obat-obatan dan tenaga medis, akses ke layanan kesehatan yang cepat dan memadai, bertanggung jawab langsung atas penyebaran dan peningkatan penyakit menular. Krisis ini tentunya membutuhkan respon global dan kerjasama kolektif (*Britannica, 2025*).

### **Peran dan Bentuk Bantuan WHO Dalam Krisis Kesehatan di Palestina (2023–2025)**

Peran WHO dalam krisis kesehatan di Palestina menunjukkan bagaimana organisasi internasional bukan hanya bertindak sebagai penyedia bantuan teknis namun juga sebagai pihak perantara, koordinator, dan mediator antara pemangku kepentingan dunia yang berbeda. WHO memainkan peran penting dalam konflik Israel-Palestina, khususnya dalam menyatukan dan mengkoordinasi kerjasama kolektif antar berbagai pihak baik itu negara-negara donor, organisasi PBB, dan berbagai organisasi kemanusiaan non pemerintah untuk bersama-sama menagani dan memenuhi kebutuhan kesehatan yang terjadi di Palestina. Tindakan WHO ini memperjelas eksistensinya sebagai aktor yang mendorong sinergi internasional dan bukan hanya menyediakan bantuan medis di lapangan (*Tarisa, 2021*).

Selama periode 2023-2025, WHO akan melaksanakan berbagai langkah konkret untuk memastikan kelangsungan layanan kesehatan dasar di Palestina. Bantuan ini meliputi distribusi obat-obatan esensial, penyediaan peralatan medis darurat, dukungan logistik, serta pelatihan dan pendampingan bagi tenaga kesehatan lokal yang bekerja dalam kondisi yang sangat terbatas. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi minimal sistem kesehatan agar dapat terus melayani penduduk sipil, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia, meskipun fasilitas kesehatan telah rusak akibat konflik. Namun, pelaksanaan bantuan WHO di Palestina menghadapi berbagai hambatan struktural dan politik. Blokade Jalur Gaza, pembatasan kebebasan bergerak bagi orang dan barang, serta risiko keamanan yang tinggi bagi tenaga kesehatan dan pekerja kemanusiaan sangat membatasi efektivitas tindakan kesehatan. Selain itu, tekanan politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik membatasi

ruang gerak diplomatik WHO, sehingga akses ke bantuan sering kali terhambat atau tertunda (United Nation, 2024). Situasi ini memaksa WHO untuk menyesuaikan diri dengan peran yang lebih luas, tidak hanya sebagai lembaga teknis kesehatan, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam diplomasi global di bidang kesehatan yang memperjuangkan kepentingan kemanusiaan (World Health Organization, 2025).

Dalam kerangka pendekatan diplomatik globalnya di bidang kesehatan, WHO secara terbuka menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata, sebagai syarat prasyarat yang mutlak untuk pemulihan sistem kesehatan di Gaza. Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, secara rutin menggunakan forum internasional, pernyataan resmi, dan konferensi pers untuk menggambarkan situasi di Gaza sebagai situasi kemanusiaan yang ekstrem yang mengancam nyawa jutaan warga sipil. WHO menekankan bahwa tanpa berakhirnya konflik, pemulihan layanan kesehatan, distribusi bantuan medis, dan perlindungan pasien serta tenaga medis tidak dapat dijamin secara optimal (Daiyan Rinjani Rachmawati, 2025).

Menurut laporan Dewan Keamanan (2024), tantangan terbesar bagi WHO dalam melaksanakan diplomasi kesehatan globalnya di Gaza adalah kurangnya konsensus politik di dalam Dewan Keamanan PBB dan perbedaan kepentingan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Kepentingan geopolitik ini sering mengalihkan perhatian dari masalah kesehatan dan kemanusiaan, sehingga menyulitkan WHO untuk mempertahankan netralitas dan efektivitas bantuannya (WHO, 2022). Dilema serupa muncul dalam krisis kemanusiaan lainnya, seperti di Tigray dan Yaman, di mana WHO harus bernegosiasi dengan para aktor politik dan militer untuk memungkinkan akses ke layanan kesehatan bagi penduduk yang terkena dampak. Meskipun menghadapi banyak kendala, WHO terus memainkan peran strategis sebagai pembentuk opini di tingkat internasional dengan menyediakan data objektif tentang dampak konflik di Jalur Gaza terhadap kesehatan. Laporan WHO, yang mendokumentasikan puluhan ribu korban, penghancuran fasilitas kesehatan, dan runtuhnya sistem kesehatan, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai alat diplomatik yang memberikan legitimasi moral atas tuntutan gencatan senjata dan perlindungan warga sipil. Dalam kerangka diplomasi kesehatan global, WHO berhasil memasukkan isu kesehatan ke dalam agenda politik global dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (Tarisa, 2021).

### **Dampak Bantuan WHO Terhadap Krisis Kesehatan di Palestina**

Peran WHO dalam pengelolaan krisis kesehatan di Palestina tidak hanya bersifat normatif dan politik, tetapi juga memiliki dampak yang dapat diukur terhadap kesehatan masyarakat, meskipun menghadapi tantangan struktural dan konflik berkepanjangan yang terus mengganggu efektivitasnya. Dampak dari tindakan WHO terlihat di beberapa bidang penting, termasuk pemeliharaan layanan kesehatan dasar, pencegahan penyebaran penyakit, penyediaan dukungan teknis, dan penguatan sistem informasi kesehatan. Konflik yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah menghancurkan hampir seluruh infrastruktur kesehatan di Gaza. Menurut laporan WHO, lebih dari 84 hingga 92% fasilitas kesehatan telah rusak atau hancur akibat serangan dan operasi militer, sehingga pada awal tahun 2025, sebagian besar rumah sakit tidak lagi beroperasi secara penuh. Hanya sekitar setengah dari 36 rumah sakit dan kurang dari 40% pusat kesehatan primer yang masih dapat memberikan layanan dasar, sementara tenaga kesehatan bekerja dalam kondisi ekstrem tanpa persediaan medis yang memadai (Balkhy,

2025). Intervensi WHO dalam bentuk perawatan medis darurat dan logistik kesehatan telah mencegah keruntuhan total sistem kesehatan dan memungkinkan beberapa fasilitas untuk mempertahankan layanannya, meskipun secara terbatas. Tanpa dukungan WHO dan mitranya, tingkat layanan kesehatan kemungkinan akan lebih rendah lagi mengingat kerusakan material dan kurangnya tenaga medis.

WHO memainkan peran penting dalam memantau epidemi, menyediakan vaksin, dan kampanye kesehatan untuk membendung penyebaran epidemi. Jumlah penyakit menular telah meningkat secara signifikan karena kondisi sanitasi yang buruk dan kepadatan penduduk, tetapi organisasi ini memberikan bantuan cepat untuk memerangi epidemi dan melakukan kampanye vaksinasi massal. Dampak konflik dan blokade terhadap akses pangan telah menyebabkan krisis pangan yang parah, terutama pada anak-anak. WHO memperingatkan akan adanya peningkatan tajam malnutrisi akut dan kematian bayi akibat malnutrisi di Gaza. Menurut WHO, pada tahun 2025 saja, puluhan anak di bawah usia lima tahun akan meninggal karena malnutrisi yang secara langsung terkait dengan terbatasnya akses terhadap makanan dan hambatan dalam pengiriman bantuan (World Health Organization, 2024). Organisasi ini juga mencatat ratusan ribu kasus malnutrisi akut yang membutuhkan perawatan darurat, sementara pusat-pusat perawatan telah mencapai kapasitas maksimumnya, bahkan kewalahan karena keterbatasan pasokan bantuan. Langkah-langkah yang diambil WHO untuk mengatasi krisis gizi meliputi distribusi suplemen makanan, peralatan pemantauan, dan pelatihan tenaga medis dalam menangani kasus malnutrisi parah, yang berhasil mengurangi peningkatan angka kematian bayi meskipun situasi semakin memburuk (Hanan H Balkhy, 2025).

Selain penyakit umum dan malnutrisi, data dari WHO dan OCHA menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyakit langka seperti *sindrom Guillain-Barré* (SGB) selama konflik, serta peningkatan tajam dalam gangguan mental. Hal ini mencerminkan dampak beragam konflik terhadap sistem kekebalan tubuh, penurunan kondisi hidup, dan tekanan psikososial yang tinggi. WHO berupaya mengatasi fenomena ini melalui dukungan psikososial, pelatihan kesehatan mental bagi tenaga kesehatan lokal, dan pemantauan epidemiologis terhadap penyakit langka yang semakin sering terjadi. Salah satu dampak penting dari kehadiran WHO di Palestina adalah peningkatan kualitas data dan transparansi situasi kesehatan melalui pemantauan berkelanjutan (Inter-Agency Standing Committee, 2022).

WHO meninjau ribuan serangan terhadap fasilitas kesehatan, tenaga medis, transportasi medis, dan pasien, serta secara sistematis mendokumentasikan dampak kerusakan infrastruktur. Data ini tidak hanya digunakan untuk perencanaan darurat di bidang kesehatan, tetapi juga memainkan peran diplomatik dalam advokasi internasional untuk mengakhiri kekerasan dan membuka akses ke bantuan kemanusiaan. Laporan tentang jumlah serangan, status operasional rumah sakit, dan tren penyakit memberikan bukti empiris yang dapat digunakan WHO untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bagi otoritas lokal dan internasional. Dampak bantuan WHO juga terlihat dalam bidang kebijakan dan diplomasi kesehatan. Data kesehatan yang dikumpulkan oleh WHO digunakan sebagai alat diplomasi untuk mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk menghormati hukum humaniter internasional dan memungkinkan akses ke bantuan kemanusiaan. Misalnya, WHO menyatakan bahwa hampir semua fasilitas air dan sanitasi di Gaza tidak berfungsi dan banyak anak menderita malnutrisi akut, serta menyerukan kepada komunitas internasional untuk menuntut dihentikannya serangan terhadap fasilitas kesehatan. Pernyataan resmi WHO sering digunakan

oleh PBB, media internasional, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat kampanye bantuan kemanusiaan, meskipun tantangan politik yang signifikan terus menghalangi respons global (World Health Organization, 2025).

## KESIMPULAN

Bantuan yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) pada periode 2023-2025 memainkan peran penting dalam menangani krisis kesehatan yang terjadi di Palestina. Sebagai aktor internasional dalam menjalankan perannya sebagai organisasi yang mengatasi isu kesehatan global, WHO tidak hanya berperan sebagai penyedia peralatan medis tetapi juga aktor diplomasi krisis di Palestina yang mampu mengkoordinasi dan menyatukan berbagai pihak baik itu aktor negara ataupun non negara untuk bersama-sama dalam menangani krisis yang terjadi. Efektivitas peran WHO ini terbukti dengan banyak negara donor yang ikut andil, mempertahankan layanan kesehatan dasar, menyediakan pengobatan terhadap korban dan berbagai penyakit menular, mengurangi dampak malnutrisi dan memperkuat pelaporan kerusakan infrastruktur yang terjadi. Selain dampak teknisnya, WHO juga memainkan peran strategis dalam diplomasi kesehatan global dengan menggunakan isu-isu kesehatan sebagai dasar normatif dan moral untuk menyerukan diakhirinya kekerasan dan dibukanya akses kemanusiaan. Dengan menyediakan data kesehatan yang objektif dan kredibel, WHO membantu membentuk opini internasional dan mempromosikan solidaritas global terhadap penderitaan rakyat Palestina. Namun, efektivitas bantuan WHO dan diplomasi kesehatannya tetap dibatasi oleh blokade di wilayah tersebut, risiko keamanan, tekanan politik, dan kepentingan yang bertentangan dari negara-negara besar dalam sistem internasional. Oleh karena itu, keberhasilan respons WHO terhadap krisis kesehatan di Palestina sangat bergantung pada penguatan kerja sama multilateral, komitmen politik global untuk melindungi layanan kesehatan di daerah konflik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip netralitas dan hukum humaniter internasional. Studi ini menekankan bahwa krisis kesehatan di Palestina tidak dapat dipisahkan dari konflik politik dan keamanan, dan oleh karena itu memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan bantuan kesehatan, diplomasi internasional, dan upaya perdamaian yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Balkhy, H. H., & Al-Mandhari, T. A. (2025). A roadmap for healing Gaza's battered health system. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 31(1), 54–55.
- [2] Britannica. (2025). Israel– Hamas war. *Encyclopaedia Britannica*. <https://www.britannica.com>
- [3] Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- [4] Anjani, F. N. A., & Oktaviani, Y. O. (2025). Peran World Health Organization (WHO) dalam menangani isu krisis kemanusiaan di Palestina tahun 2023–2024. *Global Insights Journal*.
- [5] Health Cluster. (2024). *300 days of war: Health crisis in the occupied Palestinian territory*. Health Cluster oPt.
- [6] Health Cluster. (2025). *Powerless in Gaza: Guillain-Barré syndrome brief*. Health Cluster oPt.

- [7] Inter-Agency Standing Committee. (2022). *Guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings*. IASC.
- [8] Iswara, A. J. (2023). Sejarah konflik Palestina dan Israel. Kompas. <https://www.kompas.com>
- [9] Janah, F. (2025). Statecraft ketiga bagi post konflik Israel–Palestina 2023. *Jurnal Pena Wimaya*.
- [10] Post, T. W. (2025). *Fragile ceasefire leaves Gaza civilians exposed to ongoing violence*. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com>
- [11] Rachmawati, D. R., & Azhar, Z. A. (2025). Perlindungan hukum humaniter internasional bagi tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata internasional (studi kasus konflik di Gaza 7 Oktober 2023–19 Januari 2025). *Mataram Journal of International Law*.
- [12] Robbani, A. Y. (2025). Peran UNRWA dalam menangani krisis pengungsi Palestina di Gaza: Studi kasus perbatasan Rafah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- [13] Tarisa, N. P. (2021). Peran WHO sebagai subjek hukum internasional dalam mencegah penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4–6.
- [14] United Nations. (2024). *Urgent call for action to address the health crisis in Gaza and the West Bank: Remarks by WHO Regional Director for the Eastern Mediterranean*. United Nations.
- [15] World Health Organization. (2022). *World health statistics 2022*. WHO.
- [16] World Health Organization. (2024). *Public health situation analysis: Gaza Strip*. WHO.
- [17] World Health Organization. (2025). *An initiative to leverage health diplomacy and leadership to urgently address threats to healthcare in the Eastern Mediterranean Region*. WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean.